

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Media Massa

Istilah Jurnalistik bertalian erat dengan istilah *pers* dan *media massa*. Tapi, Jurnalistik bukanlah pers atau media massa. Jurnalistik merupakan sesuatu yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. “Pers dalam arti luas mencakup semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang secara verbal dan nonverbal, lisan, tulisan dan *audio visual*. Pers dalam arti sempit hanya mengandung publikasi pikiran, gagasan, ataupun berita secara tertulis,”(Trianton, 2016). Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 ayat 1, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena itu, pers memiliki pengaruh yang amat besar terhadap masyarakat. Kuatnya pengaruh pers ini acapkali dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengendalikan suatu kondisi. Pers dijadikan alat hegemoni kekuasaan, legimitasi massa, dan pencitraan. Penguasa kerap berusaha mengendalikan pers agar pilar keempat ini tidak sampai menyebarkan opini yang dapat merusak citra pemerintah. Kelompok-kelompok elite yang memiliki kepentingan, seperti partai politik, tokoh politik, hingga agama

mendirikan dan menguasai penerbitan pers tertentu. Mereka menggunakan media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan ideologi atau program kerja mereka. Kuatnya posisi tawar pers terhadap kekuasaan, mendorong para pemilik modal baku cepat buka usaha, atau menanam modal di perusahaan-perusahaan penerbitan pers.

Meski begitu, Pers dan Media massa harus melakukan praktik jurnalisme yang profesional. Profesionalitas itu dilihat dari konsistensi dalam memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik media massa tersebut. “Secara umum pers, media massa, dan praktik jurnalistik lainnya yang baik setidaknya harus memenuhi kriteria; objektivitas, aktualitas, universalitas, publisitas, dan periodisitas,” (Trianton, 2016).

a) Objektivitas

Merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistik. Setiap berita yang dimuat dan disuguhkan harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca. Objektif adalah meliput dan menulis berita sesuai dengan fakta yang ada. Objektivitas menjadi salah satu parameter profesionalitas wartawan dalam bekerja. Media yang mampu berdiri di atas objektivitas dalam pemberitaan akan mendapat kepercayaan publik. Media seperti ini akan dipilih sebagai referensi pemerolehan informasi.

b) Aktualitas

Secara etimologis berasal dari kata *actuality* yang mengandung arti kini, sekarang, dan keadaan yang sebenarnya. Informasi yang diproduksi media massa harus mengandung unsur kebaruan, kekinian, menunjuk pada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi.

c) Universalitas

Berkaitan dengan kesemestaan media massa dilihat dari sumber informasi dan keanekaragaman substansi materi atau isinya. Universalitas juga dapat dipahami sebagai segala hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, publik tertentu, atau kelaziman yang umum. Berkaitan pula dengan perspektif pemberitaan; pemilihan isu yang berdampak bagi masyarakat, penggalian informasi, pemilihan narasumber, sudut pandang penulisan dan pengungkapan fakta.

d) Publisitas

Penyiaran, penyebarluasan informasi atau segala sesuatu kepada publik atau masyarakat luas. Publisitas berkenaan dengan luasnya sasaran atau target penyebaran informasi. Pers melalui media massa memproduksi dan mempublikasikan informasi yang ditujukan atau disebarluaskan kepada publik sasaran yang sangat heterogen. Heterogenitas sasaran publikasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu geografis dan psikografis. Heterogenitas geografis audiens menunjuk pada persoalan administrasi kependudukan, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan lainnya. Sedangkan heterogenitas psikografis massa berkaitan dengan karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat-istiadat, budaya, dan lainnya.

e) Periodisitas

Berkenaan dengan hal-hal yang bersifat periodik atau menurut periode tertentu, berkala, dan ajeg atau konsisten. Pers dan media massa yang baik, harus melakukan kerja jurnalistik secara berkala, terbit secara teratur, dan periodik. Pers haruslah konsisten dalam kala penerbitannya. Media massa

yang terbit secara berkala dan teratur akan mampu memenuhi harapan masyarakat dalam kebutuhan informasi. Media massa harus konsisten dalam menyajikan informasi, misalnya harian, minggu, bulanan, dan sebagainya. Konsistensi pemilihan kala penerbitan ini menjadi salah satu ukuran profesionalitas media massa.

Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam komunikasi massa. Sesuai kedudukannya sebagai media komunikasi publik, media massa memiliki banyak fungsi, di antaranya; penyiaran informasi, mengedukasi, memengaruhi, menghubungkan dan menjembatani, fungsi pengawasan atau kontrol sosial, penafsiran dan analisis, melakukan investigasi, dan hiburan.

a) Fungsi Penyiaran Informasi (*to inform*)

Media massa berfungsi untuk menyiarkan informasi. Ini merupakan fungsi yang paling utama. Media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingan masing-masing.

b) Fungsi Pendidikan (*to educate*)

Media massa sebagai sarana pendidikan massa. Surat kabar, radio, televisi, dan medium lainnya yang memuat dan menyiarkan ilmu pengetahuan akan menambah pengetahuan audiens. Pada fungsi ini, media berkontribusi dalam penyebaran nilai-nilai. Media massa dapat menyajikan hal-hal yang bersifat mendidik seperti pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku pada audiens.

c) Fungsi Memengaruhi (*to influence*)

Dengan fungsi ini, eksistensi media massa menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, bahkan negara sekalipun. Media

massa dapat memberi pengaruh baik yang bersifat pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*affective*), maupun tingkah laku (*conative*). Posisi media massa yang sangat strategis dalam praktik komunikasi publik berpotensi memberikan pengaruh yang besar dan massal pada masyarakat.

d) Fungsi Menghubungkan dan Menjembatani (*to mediate*)

Pesan, gagasan, aspirasi masyarakat yang tidak dapat disalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dijembatani oleh media massa. Sebaliknya, pemerintah dapat menggunakan media massa untuk memberikan penjelasan suatu kebijakan pada masyarakat melalui pertemuan dengan wartawan atau konferensi pers. Fungsi ini merujuk pada kemampuan media massa yang dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam. Media massa mampu membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

e) Fungsi Pengawasan atau Kontrol Sosial

Media mampu melakukan fungsi kontrol sosial, dengan kemampuannya masuk di segala elemen masyarakat. Peran jurnalis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan narasumber, menjadi penyedia informasi yang sangat penting. Fungsi ini merujuk pada kemampuan jurnalis mengumpulkan informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan masyarakat.

f) Fungsi Penafsiran dan Analisis

Media massa yang memiliki rubrik khusus seperti; tajuk, opini, atau kolom, berarti menyediakan ruang terbuka bagi publik untuk menuliskan berbagai analisis dan penafsiran terhadap berbagai persoalan. Melalui ruang publik ini, media mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas

wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersona atau komunikasi kelompok.

g) Fungsi Investigasi

Keberadaan jurnalis yang mampu melakukan penetrasi sosial, menyentuh berbagai lapisan masyarakat menjadikan media massa dapat menjalankan fungsi investigasi, pemimpin media dapat memberikan tugas khusus pada jurnalis untuk melakukan penggalian informasi lebih dalam terhadap sebuah kasus yang masih berupa misteri dan menarik perhatian publik.

h) Fungsi Hiburan

Berbagai hal yang bersifat hiburan dapat ditampilkan di media massa untuk mengimbangi berita-berita tentang hal-hal berat. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran audiens. Pembacaan berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran kembali segar.

Kehadiran media massa dengan segala fungsinya, membawa efek bagi perubahan masyarakat dalam suatu wilayah. Efek media massa dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu efek yang berkaitan kehadiran media massa dan efek pesan terhadap jenis perubahan yang terjadi pada khalayak. Namun, fungsi-fungsi pers tersebut kini telah bergeser. Persaingan yang semakin ketat di antara media massa, memacu media berlomba-lomba menyampaikan berbagai peristiwa dengan cepat. Semakin cepat informasi disampaikan kepada khalayak, semakin banyak khalayak yang membaca dari media tersebut. Tuntutan pers untuk menyajikan peristiwa dengan cepat inilah yang membuat banyaknya penyimpangan dari kebebasan pers yang telah diberikan. Sejak era reformasi, media massa menduduki fungsi bisnis

dan industri. Media massa juga digunakan sebagai alat agitasi dan provokasi massa. Media massa juga acapkali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan.

2. Kredibilitas dan Independensi Media Massa

a) Prinsip Kerja Jurnalistik

Prinsip-prinsip kerja jurnalistik dapat mengacu pada visi misi media yang bersangkutan, serta mengacu pada pilihan peran yang diemban media. Prinsip kerja jurnalistik berpedoman pada sepuluh elemen jurnalisme. “Kesepuluh elemen itu adalah; (1) berpihak pada kebenaran, (2) loyal pada warga, (3) disiplin verifikasi informasi, (4) independen, (5) melayani publik, (6) menyediakan ruang opini publik, (7) mengangkat persoalan yang menarik, relevan, dan penting, (8) komprehensif dan proporsional (*cover both side*), (9) mengikuti suara nurani, (10) hak dan tanggungjawab warga terkait berita,” (Trianton, 2016). Tidak hanya sepuluh prinsip, Dewan Pers juga menerbitkan sebelas Kode Etik Jurnalistik.

- 1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- 2) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- 3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- 4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- 5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- 6) Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- 7) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- 9) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- 10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- 11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

b) Hubungan Pers dan Pemerintahan

Pola hubungan pers dan pemerintah di suatu negara erat sekali kaitannya dengan sistem dan struktur politik yang berlaku di dalam negara di mana kedua lembaga itu berada, bahkan hubungan itu dipengaruhi pula oleh

perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Hubungan pers dan pemerintah di Indonesia dipengaruhi oleh sistem demokrasi, sehingga lahir konsep kebebasan pers, yakni pers yang bebas dan bertanggungjawab. Sehingga, pemerintah harus melihat “kebebasan” dan “tanggungjawab” sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, karena tanggungjawab nasional dan etika para jurnalis merupakan pilar-pilar yang menunjang tumbuhnya dan tegaknya kebebasan pers. Jaminan terhadap kebebasan pers tidak dapat dilepaskan dari kesadaran tanggungjawab dan tata krama pers.

Mengutip dari (Rachmadi, 1990), Dewan Pers berpendapat bahwa mekanisme yang tepat dan sesuai dengan semangat musyawarah yang menjadi model spiritual bangsa Indonesia adalah mengembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Karena itu masyarakat menuntut adanya suatu pers yang baik, yaitu suatu “kebebasan pers” yang *adequate*, di mana aktivitas-aktivitas pers dipengaruhi oleh kepentingan umum. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tidaklah selalu harmonis. Masyarakat tidak selalu dapat mengerti apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh pemerintah. Sebaliknya, pihak pemerintah tidak mudah memahami aspirasi dan pendapat yang timbul dari masyarakat. Pers sebagai medium komunikasi bisa berperan dua muka, di satu sisi ia dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dan pendapat dari masyarakat. Di sisi lain ia dapat menyampaikan kebijaksanaan dan kehendak pemerintah, bagaimana masyarakat harus berbuat dan bertindak. “Di negara yang bukan totaliter seperti Indonesia, pers tidak menjadi terompet pemerintah. Pers lebih

bebas dalam menampung serta menyalurkan pendapat masyarakat,”(Rachmadi, 1990).

Lebih dekat, dalam 10 tahun terakhir pers banyak yang mengoper peran dan fungsinya. Ada yang mengutamakan hiburan, ada yang mengutamakan edukasi, ada juga yang masih konsisten mengedepankan pemberitaan peristiwa. Dalam lini masa ini juga, pemerintah lebih menyadari bahwa peran pers lebih dari itu. Secara terbuka aktor politik melihat pers sebagai peluang untuk dijadikan mitra yang menguntungkan, begitu pula dengan pemerintah. Maka tidak heran, ketika satu siaran televisi mengatur penyiarannya untuk kepentingan politik semata. Fenomena ini tidak dianggap salah, sebab setiap media massa diyakini memiliki independensinya masing-masing. Hal ini yang kemudian memaksa khlayak untuk berpikir dan memilah, medium atau siaran mana yang ingin ditonton/dibaca/didengarkan.

3. Analisis *Framing*

Untuk membedah berita politik tersebut dibutuhkan analisis khusus. Terdapat beragam studi teks yang dapat digunakan, seperti analisis isi dan analisis framing. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi khusus dalam sebuah teks. Bagi sebagian peneliti, “analisis isi” tampak menunjukkan tidak lebih dari sekadar kualitas-kualitas hitungan (kata-kata, atribut-atribut, warna-warna). Ini yang kemudian membuat analisis isi terkesan hanya menggambarkan fakta-fakta yang ditampakkan dalam sebuah teks saja. Sehingga ia hampir tak bisa menampakkan tujuan teks yang tidak nampak. Maka dari itu, penulis lebih memilih menggunakan Analisis Framing.

Analisis Framing memiliki empat Model *Framing*, yakni model Zhongdan dan Gerald M. Kosicki; William A. Gamson dan Andre Modigliani; Murray Edelman; dan model Robert N. Entman. Dalam penelitian ini, penyusun memilih menggunakan model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki, karena dalam model ini menjelaskan empat struktur yang dapat melihat kecenderungan atau kecondongan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dan membuatnya menjadi produk jurnalistik. Dengan kata lain, produk dapat diamati dan bagaimana wartawan menyusun peristiwa ke dalam bentuk umum berita, cara wartawan mengisahkan peristiwa, kalimat yang dipakai, dan pilihan kata atau idiom yang dipilih. Ketika menulis berita dan menekankan makna atas peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu untuk meyakinkan khalayak pembaca bahwa berita yang dia tulis adalah benar. Pendekatan itu dapat digambarkan ke dalam bentuk skema sebagai berikut.

Tabel 2.1

Skema Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT DIAMATI
SIKTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.</i>
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proporsi, kalimat hubungan antarkalimat.
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikori 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.

Sumber: Eriyanto. (2012). *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang. Hal: 295.

Framing atau pembedaan adalah teknik untuk mengetahui perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh media saat menyeleksi isu atau peristiwa untuk disajikan kepada publik. Konsep framing merupakan konsep yang diadopsi dari ilmu kognitif (psikologis). Menurut Sudibyo (Sobur, 2009) dalam praktiknya, analisis ini juga digunakan untuk mengimplementasikan konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya.

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Cara pandang atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta akan dibawa kemana berita tersebut. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan untuk mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakan. Dalam perspektif ilmu lain, framing terkesan tumpang tindih. Fungsinya, banyak dikatakan sebagai struktur internal dalam pikiran dan perangkat yang dibangun dalam wacana politik.

Pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi penulis beserta media yang terlibat dalam proses produksi. Realitas yang ditayangkan secara mencolok tentu memiliki peluang besar untuk diperhatikan dan memengaruhi khalayak dalam memahami realitas.

Menurut Pan dan Kosicki dalam (Eriyanto, 2012), ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. pertama, dalam konsepsi psikologi. “Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing di sini dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks yang unik/khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih menonjol dalam kognisi seseorang,”(Eriyanto, 2012). Elemen-elemen yang diseleksi dari suatu isu/peristiwa tersebut menjadi lebih penting dalam memengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan tentang realitas. Kedua, konsepsi sosiologis. Pandangan psikologis lebih melihat pada proses internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu, maka pandangan sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Bingkai di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya.

Bagi Pan dan Kosicki, framing pada dasarnya melibatkan kedua konsepsi tersebut. Dalam media, framing karenanya dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak, yang semuanya dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dan praktik kerja profesional wartawan. Framing lalu dimaknai sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak.

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Frame ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita ke dalam teks secara keseluruhan. Secara struktural dapat diamati dari pemilihan kata atau simbol yang dibentuk

melalui aturan atau konvensi tertentu. Ia berfungsi sebagai perangkat framing karena dapat dikenal dan dialami, dapat dikonseptualisasikan ke dalam elemen yang konkret dalam suatu wacana yang dapat disusun dan dimanipulasi oleh pembuat berita, dan dapat dikomunikasikan dalam kesadaran komunikasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari acuan untuk dijadikan contoh oleh penulis untuk kebutuhan penelitian. Melalui hasil karya tulis ilmiah dari penelitian terdahulu, dengan kata lain penulis yang mengutip berbagai penjelasan yang dijelaskan dan untuk memperlengkap penelitian. Dengan demikian, hasil yang didapatkan sebelumnya memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul penelitian	Perguruan Tinggi
Aprizal	Kualitas Bahasa Berita Media Online antara News Jambi (Studi Pemberitaan Politik Pemilihan Wali Kota Janbi 2018)	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Nurwahyuni	Independensi Beritatrends.Com dalam Pemberitaan Politik Lokal Jawa Timur.	IAIN Ponorogo

Hasil dari penelitian pertama menyimpulkan bahwa, Kualitas bahasa berita media Antara News Jambi sudah memenuhi syarat sebagai berita yang berkuaitas. Hal ini didasarkan pada hasil anaisis berita mengenai Pilwako Jambi 2018 dengan melihat pada sumber berita, akurasi judul dan isi berita, objektivitas berita, keberimbangan berita, serta kejelasan isi berita. akurasi judul dan isi berita ditekankan pada bagian lead berita,dimana pada bagian ini pokok dan inti

berita berada, adapun untuk unsur keseimbangan dan keberimbangan berita dapat dilihat pada bagian kutipan berita. yang tidak hanya menekankan pada satu narasumber, tetapi juga mencantumkan narasumber berbeda untuk penyeimbang.

Dalam penelitian yang kedua, memiliki orientasi yang relatif sama. Lebih spesifik, penelitian kedua ini sama halnya dengan yang akan disusun oleh penyusun dalam penelitian ini, mengukur independensi meja redaksi dari sebuah media massa. Berita-berita politik lokal dalam Beritatrends.com edisi bulan Februari-Oktober 2018 tampil dengan wajah tidak independen. Isi berita memuat unsur personalisasi pada person tertentu, sehingga pembaca diarahkan kepada opini positif dan stereotype kepada suatu obyek. Meskipun tampilan beberapa berita politik lokal Beritatrends.com tidak independen, namun berita-berita tersebut disajikan dengan memenuhi unsur-unsur berita yang baik yaitu adanya unsur 5W+1H, dan berita-berita tersebut akurat dengan mencantumkan waktu terjadinya suatu peristiwa, kesesuaian judul berita dengan isi berita, dan mencantumkan foto atau gambar peristiwa sebagai data pendukung.

Adapun perbedaan dengan yang akan saya teliti ialah pendekatan dan konteks yang dipilih. Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan M. Kosicki , untuk memperlihatkan bagaimana berita yang disajikan mempertimbangkan persona tokoh yang ditampilkan.

C. Kerangka Pemikiran

Media dengan segala tugas dan fungsinya, dapat menjembatani pemerintah dan masyarakat lebih mudah sebab perannya yang independen memungkinkan hal itu terjadi. Sering kali kelompok-kelompok bersinergi bersama media massa, atau kelompok ini memiliki “tim media”, yang bekerja untuk kepentingan agenda-agenda politik mereka. Di sinilah media masuk ke dalam gambar. Dalam dunia modern ini, media berfungsi sebagai jendela orang-

orang yang berada dunia politik, untuk mengonstruksi citra mereka dan membangun keyakinan politik kita.

Portal berita online Kabar Priangan, dalam menerbitkan pemberitaan politik tentang Penjabat Wali Kota Tasikmalaya menampilkan citra persona baik dari sisi Cheka, tanpa celah. Secara sistematis dan berkelanjutan, pemilihan topik, judul, serta visual yang nampak menampilkan Cheka sebagai pemimpin yang kompeten dan rela berkorban. Atas dasar itu, penelitian ini akan mengupas berita politik tentang Penjabat Wali Kota Tasikmalaya di Kabar Priangan dalam periode 2022, menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan M. Kosicki untuk mendapatkan hasil yang deskriptif tentang bagaimana sang tokoh diberitakan. Dengan demikian, disusun menjadi tabel sebagai berikut

Tabel 2.3
Kerangka Pemikiran

